

## ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, terdapat 169 (seratus enam puluh sembilan) Negara yang lebih leluasa untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia sehingga terdapat kemungkinan makin banyaknya Orang Asing yang datang dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Tindakan pidana dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Seperti yang dipaparkan dalam paragraf diatas itulah menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pengaturan dan proses penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal serta apakah regulasi/kebijakan hukum pidana belum memadai sehingga banyak terjadi pelanggaran dibidang keimigrasian, dari latar belakang itulah menarik untuk di teliti lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Dan untuk analisis data menggunakan analisis kualitatif,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan (1) Untuk mengetahui pengaturan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana yang saat ini terjadi terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing, (3) Untuk mengetahui hambatan hambatan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah jawa tengah. Berdasarkan hasil penelitian, Penyalahgunaan Izin tinggal orang asing diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia. Proses penegakan hukum pidana keimigrasian selama 4(empat) tahun ini terdapat 8 (delapan) kasus peradilan yang telah mendapat putusan. Hambatan hambatan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Jawa Tengah terdapat dua faktor yakni faktor regulasi atau dari sisi aturan yang masih terdapat kelemahan sehingga dapat memunculkan peluang untuk dilakukan pelanggaran dan kelemahan lainnya adalah faktor Sumber Daya Manusia penegak hukumnya yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pidana, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Visa Kunjungan, Orang Asing, Keimigrasian.

## ***ABSTRACT***

By the Presidential Decree Number 21 Year 2016 About Visa Free visit, there were 169 (one hundred and sixty nine) State has more flexibility to exit and enter Indonesian territory so there is the possibility of increasing number Foreigners who come and stay permit misuse. Criminal action can be done in case of abuse of residence permits were made by foreign nationals which are spread throughout the Republic of Indonesia. As described in the paragraph above that begs the question, how the setting and the process of law enforcement abuse of a residence permit and whether the regulation / policy of criminal law is not adequate so many violations in the field of immigration, from a background that is of interest to be investigated further related to criminal enforcement against abuse of residence permits of foreigners in Central Java.

The method used in this research is empirical juridical approach. For data collection through interviews and literature research. And to analyze the data using qualitative analysis,

This research to study the problems (1) To determine the arrangements for the abuse of residence permits of foreigners, (2) To determine and analyze the enforcement of criminal law that is currently happening to the abuse of residence permits of foreigners, (3) To know the resistance barriers criminal enforcement against abuse of residence permits of foreigners in the region of central Java. Based on the research results, Abuse permit foreigners to stay regulated in Law No. 6 of 2011 Concerning Immigration. From the data and work experience in the field, that the sanctions in case of misuse of immigration residence permit is more often non-pro justitia. The process of criminal enforcement of immigration for 4 (four) years, there are eight (8) cases courts have got the decision. Barriers barriers criminal enforcement against abuse of residence permits of foreigners in the region of Central Java, there are two factors of regulatory factors or of the rules that there are still weaknesses that can bring opportunities to do violations and other weaknesses are factors Human Resources law enforcement is not maximized in carry out their duties.

Keywords: Law enforcement, Crime, Abuse of Residence Permit, Visitor Visa, Foreigners, Immigration.

## **KATA PENGANTAR**